

Kritik bagi Pemimpin

Majalah



Beranda

Kompas

K

make money from
WEBSITE or

myenglish

- The Jakarta Post Editorial: Endorsing Jokowi
- Why Japan Is Great
- Sharpen your Shaw
- Larantuka Beach, Reinha City (East of Nusa Tenggara)
- Sungailiat, Bangka Island (Kepulauan Bangka Belitung Province, Indonesia)

Follow by Email

Email address...

Submit

Pengikut

HATI BERICARA

Arsip Blog

- ▶ 2014 (1399)
- ▼ 2013 (1521)
 - ▶ Desember (148)
 - ▼ November (150)
 - Mengapresiasi Solidaritas Dokter (Marwan Mas)
 - Kepentingan Indonesia di WTO Oleh: M RIZA DAMANIK...
 - Religiositas "Bangsa Wayang" (ASEP SALAHUDIN)
 - Memakai Mogok Dokter (JB Soebroto)
 - TAJUK RENCANA "Cause Celebre" Dokter Ayu (Kompas)
 - TAJUK RENCANA: China Jangan Bermain Api (Kompas)
 - Tetap Optimistis Memberantas Korupsi (Todung Mulya...)
 - Pesan dari Putusan Angie

Sabtu, 16 November 2013

Bukan Negara Hakim (M Hadi Shubhan)

DALAM konstitusi secara tegas dikatakan: negara Indonesia negara hukum (rechtstaat), bukan negara hakim (rechterstaat).

Tindakan Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Mahkamah Konstitusi merupakan langkah untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara hukum dari kekuasaan MK yang absolut dan tidak terkontrol, yang mengarah menjadikan republik ini sebagai negara hakim.

Sejatinya konstitusi sudah mendudukan MK secara proporsional dengan kewenangan dan segenap kontrolnya. Namun, atribusi konstitusi itu secara perlahan telah dilucuti oleh MK. Soal kewenangan, MK memperluas diri kewenangannya dengan cara melalui putusannya dan cara membatalkan norma yang membatasi dirinya. Demikian pula lembaga kontrol eksternal, yaitu Komisi Yudisial, telah diampunasi kewenangannya oleh MK.

Kontrol kewenangan terhadap MK setidaknya-tidaknya melalui UU yang mengatur kelembagaan MK. Beberapa fakta yang membuktikan MK telah melucuti sistem kontrol tersebut, antara lain, dalam UU MK menentukan bahwa UU yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Faktanya, ketentuan ini dikesampingkan. MK menguji UU bukan hanya UU yang lahir sebelum amendemen UUD 1945, bahkan menguji UU yang lahir pada zaman Hindia Belanda.

Fakta lain, MK juga telah membatalkan 10 pasal dalam UU No 8/2011 tentang Perubahan UU No 24/2003 tentang MK, yaitu Pasal 4 Ayat (4 f-h), Pasal 10, Pasal 15 Ayat (2h) sepanjang frase "dan/atau pernah menjadi pejabat negara", Pasal 26 Ayat (5), Pasal 27A Ayat (2c-e), (3), (4), (5), (6), Pasal 50A, Pasal 59 Ayat (2), dan Pasal 87. Pasal-pasal tersebut sejatinya adalah pembatasan dan penertiban kewenangan dan kelembagaan MK, tetapi oleh MK dinyatakan tidak mengikat.

Melanggar prinsip hukum

Tindakan MK yang membatalkan UU MK adalah refleksi membabi butanya MK dalam menghabisi norma yang membatasi dan mengatur lembaganya. Kelakuan MK ini jelas bertentangan dengan prinsip Nemo Judex In Propria yang berarti bahwa tidak ada seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Ini berarti MK telah melanggar salah satu prinsip hukum.

Perppu tentang MK ini, dan juga ketika sudah disahkan menjadi UU, tidak boleh di-judicial review sendiri oleh MK karena hal ini melanggar prinsip hukum tersebut. Selama ini MK telah berselingkuh dengan oknum akademisi tertentu yang mengaku sebagai ahli konstitusi di negeri ini, dengan cara kelompok akademisi itu mengajukan judicial review pasal tertentu dari UU MK yang dianggap membatasi kekuasaan MK. Pengajuan ini tentu disambut gembira dan bisa dipastikan MK membatalkan pasal tertentu dari UU MK yang mengekang kewenangannya itu.

Dalam pada itu, melalui putusan-putusannya, MK juga menambah kewenangan-kewenangan yang melekat pada dirinya. MK telah melebihi kewenangannya dalam mengadili perkara pengujian UU. Pengujian UU sejatinya adalah mengoreksi UU jika UU tersebut bertentangan dengan konstitusi. Sejatinya, kewenangan mekanisme koreksi ini menjadikan MK berfungsi sebagai negative legislator. Mekanisme koreksi ini sebagai sarana checks and balances terhadap lembaga pembuat UU, yakni DPR bersama Presiden.

Dalam perkembangannya, kewenangan mekanisme koreksi UU ini dipertuas MK dengan cara memformulasikan secara positif norma dalam UU. MK sebagai negative legislator telah memosisikan diri menjadi positive legislator. Posisi ini jelas mengganggu lembaga pembuat UU, yaitu DPR bersama Presiden.

Kesaktian MK kian bertambah dengan dibatalkannya UU No 22/2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam UU KY tersebut diberikan kewenangan kepada KY untuk mengawasi seluruh hakim, baik hakim di lingkungan peradilan pada MA maupun hakim konstitusi pada MK. Kepentingan MK pada putusan yang membatalkan UU KY ini adalah tidak inginnya lembaga MK diawasi lembaga luar, dalam hal ini KY.

BIDVERTISER

monetize your
WEBSITE
or
BLOG!

RELASI

- Menjadi Indonesia Baru
- Humor Semua Umur
- Sehat dan Sejahtera
- Ekspresi Hati
- Penyuluhan Agama

Entri Populer

- Pilkada dan Daulat Elite (Yunarto Wijaya)
ARGUMENTASI yang mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD (pilkada tidak langsung) terbantahkan. Jika dirangkum, pendapat ...
- Potret Guru Indonesia (Ifa H Misbah)
PENELITI R Murray Thomas pernah berkontribusi melakukan penelitian pendidikan dari perspektif sosio-antropologis, yaitu The Prestige of Teac...
- Jangan Mempermainkan Pendidikan (Daed JOESOEF)
Menjelang pembentukan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla tercetus aneka ide spekulatif tentang berbagai bidang kehidupan. Sejahter menyenggung pe...
- Membangun Perekonomian Berbasis Iptek (Hendra Gunawan)
Di tengah hiruk-pikuk Pemilu Presiden 2014, ada berita mengembirakan: perekonomian Indonesia berhasil masuk 10 besar dunia (Kompas, 3 Mei 2...
- Keamanan Dalam Negeri (Agus Widjojo)
SOFYAN Effendi dalam Kompas edisi 1 September lalu menyatakan perlu dibentuk Kementerian Keamanan Tanah Air. Mungkin ini terjemahan dari Hom...

(Satu Isra)

Rapuhnya Ketahanan Energi
(PRI AGUNG RAKHMANTO)TAJUK RENCANA: Sulit
Berharap pada KTM WTO
Bali (K...)TAJUK RENCANA: Urusan Guru
Ditangani Pusat (Kompas...)Kebudayaan dan Antisipasi
(Ignas Kleden)VIP-kan Guru-guru Kita!
(Anies Baswedan)Sains dan Pendidikan Sains
(Premana W Premadi)Kepantasan Dokter Melakukan
Mogok (Ali Ghufron Muk...)TAJUK RENCANA: Ketegangan
RI dan Australia Mereda ...Tajuk Rencana: Bersiap
Hadapi Pelambatan
(Kompas)Menilai Kerusakan Relasi RI-
Australia (Vedi R Hadi...)Pemilu Tak Serentak
(Mohammad Fajrul Falaakh)Strategi Pertahanan Nasional
(Da'ed Joesoef)Memeriksa Wapres dalam
Perspektif Konstitusi
(Bahr...)TAJUK RENCANA: Relevansi
Forum Kebudayaan
(Kompas)...TAJUK RENCANA: Israel Tidak
Punya Pilihan (Kompas)...Dehumanisasi Pendidikan
Kedokteran (Satryo
Soemant...)Langkah Menghadapi
Penyadapan (KIKI
SYAHNAKRI)Mau ke Mana Kebudayaan Kita
(Radhar Panca Dahana)Thaksin Belum Dapat
Dimaafkan (Tajuk Rencana
Kompas...)Profesi yang tak Tertinggal
(Tajuk Rencana Kompas...)

Budi Kemuliaan (Yudi Latif)

Krisis Etika Kekuasaan
(Siswono Yudo Husodo)Latihan Bersama AL Komodo
2014 (Untung Suropati)Ahlil Waris Budaya Dunia (Yudi
Latif)Iran Hentikan Sementara
Nuklirnya (Tajuk Rencana
K...)Melunasi Utang Kasus Century
(Tajuk Rencana Kompas...)Mengerem Pertumbuhan
Ekonomi (A Tony
Prasetyantono...)Mata Angin Kebudayaan Kita
(Donny Gahril Adian)Desakralisasi Psikologi (Putu
Wijaya)Pulang Kampung (Bambang A
Sipayung)MK "Menunggak" Pemilu
Serentak (EFFENDI GAZALI)Mempertaruhkan Afganistan
(Tajuk Rencana Kompas)Utang yang Produktif (Tajuk
Rencana Kompas)Jika Garuda Murka (Ikhar Nusa
Bhakti)Menjinakkan Kanguru
(Airlangga Pribadi Kusman)Di Atas Kertas (Acep Iwan
Saidi)Kemitraan RI dan Belanda
(Tajuk Rencana Kompas)Berbuat Melalui Putusan
(Tajuk Rencana Kompas)Ketika Australia Menyadap
Kita (Hamid Awaludin)Penyadapan dan Pasang Surut
RI-Australia (Gregori...)

Suku Bunga (Anton)

Dengan kekuasaannya yang absolut tersebut, yakni putusannya final, kewenangannya ditambah-tambah sendiri, dan tidak terjamah pengawasan dari luar, MK sering melakukan hal-hal yang cenderung semau sendiri. Seakan, secara tersirat, MK mengatakan bahwa negara ditentukan oleh para hakim konstitusi di MK. Tindakan MK ini berarti telah memosisikan Indonesia sebagai negara hakim (rechterstaat) dan bukan negara hukum (rechtstaat).

Alhasil, jika nanti MK melakukan judicial review terhadap Perppu MK ataupun ketika sudah disahkan jadi UU, harapan kembali untuk memartabatkan MK akan menemui jalan buntu. MK akan tetap berpotensi tanpa batas kewenangan dan tanpa pengawasan. Jika itu terjadi, sejarah Firaun akan terulang kembali, dan tongkat-tongkat Nabi Musa yang akan menghentikan absolutisme MK.

M Hadi Shubhan, Pengajar Filsafat Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum di FH Unair

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000002928384

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Diposkan oleh SEHAT SINERGIS di 06.31



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Join this site

With Google Friend Connect

Members (25)

More »



Already a member? [Sign in](#)

Posting Lebih Baru

Beranda

Posting Lama

Langganan: [Poskan Komentar \(Atom\)](#)



SEHAT SINERGIS

	Indonesia	36
	India	1

Today	38
Total	74461
Online	1

[Get this](#) [Money](#) [Stats](#)

Live Traffic Feed

UNLIMITED Domains	
Web Hosting	
A visitor from Malang, Jawa Timur	viewed "KRITIK BAGI PEMIMPIN Bukan Negara Hakim (M Hadi Shubhan)" 6 secs ago
A visitor from Malang, Jawa Timur	left "KRITIK BAGI PEMIMPIN Bukan Negara Hakim (M Hadi Shubhan)" via print.kompas.com 30 secs ago
A visitor from Malang, Jawa Timur	viewed "KRITIK BAGI PEMIMPIN Bukan Negara Hakim (M Hadi Shubhan)" 1 min ago
A visitor from Jakarta, Jakarta Raya	viewed "KRITIK BAGI PEMIMPIN Program Darurat Kependudukan (Kompas)" 50 mins ago
A visitor from Surabaya, Jawa Timur	viewed "KRITIK BAGI PEMIMPIN Memilih Ratu Adil (Airlangga Pribadi Kusman)" 52 mins ago
A visitor from Jakarta, Jakarta Raya	viewed "KRITIK BAGI PEMIMPIN Januari 2013" 1 hr 14 mins ago
A visitor from Jakarta, Jakarta Raya	viewed "KRITIK BAGI PEMIMPIN Pemilu Tak Serentak (Mohammad Fajrul Falaakh)" 1 hr 47 mins ago
A visitor from Disseldorf, Nordrhein-Westfalen	viewed "KRITIK BAGI PEMIMPIN Parlu Terbosan dalam Menangani Lingkungan (Emmy Hafid)" 1 hr 57 mins ago
A visitor from Jakarta, Jakarta Raya	viewed "KRITIK BAGI PEMIMPIN 2013" 2 hrs 39 mins ago
A visitor from Indonesia	viewed "KRITIK BAGI PEMIMPIN Jangan Mempertaruhkan Pendidikan (Da'ed JOESOEF)" 2 hrs 53 mins ago

Real-time view · Menu

Refleksi Harian Pribadi

- Sekilas Sejarah BULAN KITAB SUCI NASIONAL
- SURAT GEMBALA KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA MENYAMBUT PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 9 JULI 2014
- Fitnah (= gosip) itu mirip kasus bulu ayam
- Keintiman dengan Tuhan
- 10 Sikap Hidup Bahagia

Hendranata)

Hikmah Indonesia bagi Myanmar (David T Hill)

Siapa Lagi yang Bermain di Lebanon (Tajuk Rencana ...

Saling Pandang Berujung Bentrok (Tajuk Rencana Kom...

Pesta Hampir Usai (INDRA TRANGGONO)

Dekonstruksi Otonomi Versi Elite (Robert Endi Jawe...

Mewujudkan Potensi Indonesia (Axel van Trotsenburg...

Melihat Banjir Jakarta (Dicke Nazzary Akbar)

Karya Inovatif Remaja (Tajuk Rencana Kompas)

Australia, Apa Maumu? (Tajuk Rencana Kompas)

Kodifikasi (JE Sahetapy)

Ke(tidak)bebasan Pemilik Media (Agus Sudibyo)

KTM Ke-9 WTO dan Paket Bali (Gita Wirjawan)

Bandara Cermin Kita (Tajuk Rencana Kompas)

Uighur Tantangan bagi China (Tajuk Rencana Kompas)...

Meretas Asa, Membangun Wibawa (J Kristiadi)

Demokrasi (di) Republik (Yonky Karman)

Kaum Muda dalam Pemilu 2014 (Djayadi Hanan)

Mengawasi Laut (Arif Satria)

Demokrasi, Korupsi, HAM (Ignas Kleden)

Filipina dan Solidaritas Antarbangsa (Tajuk Rencan...

Transformasikan Ekonomi (Tajuk Rencana Kompas)

Ekonomi Perbanyak Doa (Faisal Basri)

TB Simatupang Pahlawan Nasional (Sayidiman Suryoha...

Pelajaran dari "Tuan Takur" (Saïd Aqil Siradj)

Bukan Negara Hakim (M Hadi Shubhan)

PTN Badan Hukum Harus Akuntabel Oleh: Chan Basarud...

Jangan Berharap Ada Perdamaian (Taju rencana Kompa...

Tindak Premanisme di MKI (Tajuk Rencab

Jebakan Demokrasi (Radhar Panca Dahana)

Sistem Kesehatan (Masih) Sakit (Hasbullah Thabrany...

Dinasti Rente (Dahnil Anzar)

Jakarta Melawan Banjir (Tajuk Rencana Kompas)

Langkah Pertama Mesir (Tajuk Rencana Kompas)

UU Pendidikan Dokter (Kartono Mohamad)

Pragmatisme Kebijakan Ekonomi (Ahmad Erani Yustika...

Kita dan Harta (Kurmia JR)

Di Balik Terpuruknya Peringkat PT (Bambang Cipto)

Pelajaran bagi Yingluck (Tajuk Rencana Kompas)

Kenaikan Bunga Acuan BI (Tajuk Rencana Kompas)

Korupsi dan Bea Cukai (Emerson Yuntho)

(Ilusi) Pemerintahan Terbuka (Ilham B Saenong)

Pengendalian Mutu Pendidikan

(Doni Koesoema A)

Ratifikasi Konvensi Orang Hilang (M Daud Berueh)

Preah Vihear Milik Kamboja (Tajuk Rencana Kompas)

Dukungan bagi Keluarga TKW (Tajuk Rencana Kompas)

Menjerat Koruptor dari Putusan MK (Marwan Mas)

Ironi (Korupsi) Pendidikan (Febri Hendri AA)

Indonesia Mencari Pemimpin (Adhie M Massardi)

Musibah Heli Mi-17 dan Perbatasan (Tajuk Rencana K...

Nuklir Iran, Masih Ada Kesempatan (Tajuk Rencana K...

Analisa Politik: Opor Bebek

Liberalisasi yang Terkendali (A Tony Prasetyantono...

Soeharto-Bang Ali dan SBY-Jokowi (Christianto Wibi...

Reproduksi Aktivistik Antikorupsi (Dedi Haryadi)

Solidaritas untuk Filipina (Tajuk Rencana Kompas)

Terjebak Rivalitas Lembaga (Tajuk Rencana Kompas)

Dilema Upah Minimum Provinsi (A Prasetyantoko)

Perlu Berapa Pahlawan Nasional? (Asvi Warman Adam)...

Penerobos Batas dan Kelumrahan (Anies Baswedan)

Pahlawan Iptek (Liek Wilardjo)

Pilihan Pahit untuk Polri (Adnan Topan Husodo)

Selubung Misteri Kematian Arafat (Tajuk Rencana Ko...

Menyoal Investasi Asing (Tajuk Rencana Kompas)

Cermin Sudah Telanjur Retak (Adi Andojo Soetjipto)...

Kelangkaan Buku Nikah (Lies Marcoes)

Pertanian yang Berdaulat (SUWIDI TONO)

Benang Kusut Solusi Suriah (Zuhairi Misrawi)

Investasi dan Soal Kedaulatan (Tajuk Rencana Kompa...

Perlawanan Baru di China (Tajuk Rencana Kompas)

Kebijakan Pengupahan (Rekson Silaban)

Menyikapi Penyadapan (Hikmahanto Juwana)

Politik Pragmatis Anak Muda (Diatyka Widya Permata...

Formulasi Kebutuhan Hidup Layak (Fahrul Riza)

DPT dan Partisipasi Politik (Tajuk Rencana Kompas)...

Vonis Berani Pengadilan Banglades (Tajuk Rencana K...

Bahasa Gado-gado (DEDDY MULYANA)

"Horas di Hamu Pasifik" (Daeod Joesoef)

Menguatkan Pilar Industri (Sandiaga S Uno)

Menjaga Independensi KPU (M Faishal Aminuddin)

Korea Utara Dinilai Berilusi (Tajuk Rencana Kompas)...

Mengawal Dana Optimalisasi (Tajuk Rencana Kompas)

Menuju Peta Timur Tengah yang Baru (Ibnu Burdah)

Hijrah Politik Berkeadaban (Asep Salahudin)

Momentum Perjuangan dan

Perubahan (Fathorrahman)
 Merindukan Pemimpin Prorakyat (IVAN HADAR)
 Pakistan dalam Posisi Serba Salah (Tajuk Rencana K...
 Kepatutan Upah Buruh (Tajuk Rencana Kompas)
 Peringkat "Doing Business" Masih Tercecer (A Tony ...
 Day 380 - What Does Meditation Accomplish?
 Menunggu Reformasi Agraria (Galih Andreanto)
 Arus Balik Politik Kekebabatan (M Alfian Alfian)
 Percayalah Saya Sedang Berbohong! (Ignatius Haryan...
 Waspada! PTN Badan Hukum (Tulus Santoso)
 Dari Akil ke Hamdan (Tajuk Rencana Kompas)
 Suriah Memenuhi Janji (Tajuk Rencana Kompas)
 Daerah Desak Mendagri Dipecat
 Sengketa Pilkada dan Demokrasi (Lambang Trijono)
 Pembinaan Lembaga Negara (Bambang Kesowo)
 Memutus Mata Rantai Korupsi (Masdar Hilmy)
 Skandal Penyadapan AS (Tajuk Rencana Kompas)
 Segera Putuskan Perppu (Tajuk Rencana Kompas)

- ▶ Oktober (156)
- ▶ September (153)
- ▶ Agustus (123)
- ▶ Juli (134)
- ▶ Juni (123)
- ▶ Mei (131)
- ▶ April (130)
- ▶ Maret (122)
- ▶ Februari (100)
- ▶ Januari (51)

- ▶ 2012 (166)
- ▶ 2011 (70)
- ▶ 2010 (3)
- ▶ 2009 (2)

Mengenai Saya

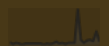


SEHAT SINERGIS

Lihat profil

lengkapku

Total Tayangan Laman



263,493

hati berbicara

- [Pemilu 2014: Umat Katolik Jangan Golput](#)
- [Guru Pendidikan Agama Katolik: Demi Bangsa Indonesia yang Cerdas dan Sejahtera](#)
- [Pembina BIA: Mendekatkan diri Anak kepada Tuhan](#)
- [Penyusunan Model Materi Penyuluhan Kategori Anak, Remaja/ Orang Muda Katolik, Keluarga, dan Masyarakat Umum](#)
- [Sosialisasi PBM, Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama](#)

Template Travel. Diberdayakan oleh [Blogger](#).